

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrih, Ivida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Bentham, Jeremy, *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, Cavendish Publishing, London, 1977.
- Frederich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Nusamedia, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bandung, 2002.
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan kedua, Super Sukses, Jakarta, 1982.
- Hansen, Bradley, *Bankruptcy Law in The United State*, Makalah, Mary Washington College, Washington DC, 2010.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 1999
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Max Knight, University of California, Amerika Serikat, 1976.

Kenan, Denis dan Sarah Riches, *Business Law*, 7th edition, Pearson Longman, Inggris, 2005.

Mallesons, Stephen Jaque, *Australia Finance Law*, Third Edition

Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

Phillips, Estelle M. dan Pugh, Derek S., *How to get a PhD, A Handbook for students and their supervisors, Fourth Edition*, Open University Press, Mc Graw Hill Education, Inggris, 2005.

Putro, Widodo Dwi, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Saleno, Thomas J. et. Al., *The Executive Guide to Corporate Bankruptcy*, Beard Books, Washington DC, 2001.

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, 2009.

Sinaga, Syamsudin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan I, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Sukirno, Timur, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sutantio, Retno Wulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustita, Bandung, 1996.

Sutikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002

JURNAL DAN MAKALAH

Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Armour, J., *The Law and Economics of Corporate Insolvency: A Review*, ECRC, Center for Business Research, University of Cambridge, Working Paper No. 97, 2019.

Korobkin, sebagaimana dikutip oleh Helen Anderson, *Theory and Reality in Insolvency Law: Some Contraction in Australia*, Jurnal yang dimuat di <http://www.gov.au/legislation/Bill/25/09/2008>.

Nugroho, Arif dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume No. 2 September 2007.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 18 Februari 2003

TESIS

Hasanah, Aida Nur, *Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Nurjanah, Eki, *Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/A.P/2007/PN.Niaga.Smg. tentang Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Thoyyibah B., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan PAilit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 18.00 WIB.

Iqbal. Muhammad, *Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit*, Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit (bplawyers.co.id), Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 10.46 WIB.

